

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu.
- Adiwirya, M. F. (2015). Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada SKPD Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, 611–628.
- Alfarizi, S., & Juniarti. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Transparansi, Pengawasan dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Bekasi (Periode Tahun 2015-2018)*. 1, 1–24.
- Batubara, Z., & Risna, R. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(1), 95–109.
- BPKP. (2007). *Akuntabilitas Instansi Pemerintahan Edisi Kelima* (T. Oktiarti (ed.); Kelima).
- Fawaidi, A. (2021). *Korupsi Dana Hibah PEN, Mantan Kadis Pariwisata Buleleng divonis 2 Tahun 8 Bulan Penjara*. Kompas.Com. <http://kmp.im/AGCBOF>
- Febria, A., Taufik, T., & Safitri, D. (2021). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Dimoderasi Pengawasan Internal. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(1), 37–44.
- Fitriandini. (2021). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Revisi Anggaran Pada Efektivitas Pengelolaan Anggaran OPD Pemerintah Kota Surabaya*. UPN Veteran.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Empat). Salemba Empat.
- Haryanto, Sahmuddin, & Arifuddin. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Laporan perekonomian provinsi bali, (2021).
- Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Inspektorat, A. (2016). *Jenis-jenis Pengawasan*. Inspektoratdaerah.Bulelengkab.Go.Id.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 30–41.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Mayasari, R. P. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik dan Prinsip Value For Money Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Jurnal Kompetitif*, 1(1), 1–113.
- Merina, C. I., Verawaty, & Yolantari, A. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Bengkulu Selatan. *SEMHAVOK*, 73–81.
- Mursyidi. (2009). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Refika Aditama.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020, (2020).
- Pranishita, A. K. (2021). *Rumah Jabatan Disewakan, mantan Sekda Buleleng diperiksa Kejati Bali*. <https://cdn.antaraneews.com/cache/360x240/2021/03/23/IMG-20210323-WA0077.jpg>
- Rahaju, E. E. (2018). *Potret Partisipasi (Semu) Publik Sebagai Pengambilan Keputusan Representatif Dalam Penyusunan APBD*. Universitas Merdeka Madiun.
- Ramdhani, M. R. A. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Luwu Timur*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Safi, Winarwati, I., & Rusdiana, E. (2018). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran APBD di Kabupaten Bangkalan. *Yustisia*, 4(2).
- Setiawan, H. (2020). *PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, TRANSPARANSI PUBLIK, PARTISIPASI PUBLIK DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBD DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERAT PADA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG*. IIB DARMAJAYA.
- Setiawan, W. (2012). *PENGARUH AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ( LKPD ) PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA*. Universitas Diponegoro.
- Sriwijayanti, H. (2018). *DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN APBD ( Studi Persepsi Pengelola APBD SKPD Dinas Pemerintah Kota Padang )*. *Jurnal*

*EKOBISTEK*, 7(1), 89–101.

- Suadnyana, S. (2021). *Mantan Sekda Buleleng Bali Tersangka Kasus Suap Rp16 Milyar Segera Diadili*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-5813299/mantan-sekda-buleleng-bali-tersangka-kasus-suap-rp-16-m-segera-diadili>
- Sudewi, N. (n.d.). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Komitmen Organisasi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syahputra, R. A. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value for Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah*. Universitas Sumatera Utara.
- Tuko, K. (2020). PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU. *E-Journal Untag*, 1(2).
- Wandari, D. N. T., Sujana, E., & Putra, I. M. P. (2015). ANGGARAN BERKONSEP VALUE FOR MONEY PADA INSTANSI e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. *E-Journal S1 Akuntansi*, 3(1).
- Werimon, S. (2005). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)* (Issue November). Universitas Diponegoro.
- Widiantari, K. G. (2019). *Pengaruh Penyempurnaan Sistem Administrasi, Sistem Reward, dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Berbasis Kinerja pada SKPD Kabupaten Buleleng*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan Teori Keagenan pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi pada Provinsi di Indonesia). *JRAK*, 7(1), 11–21.